

BAB II KAJIAN TEORI

2.1. Konsep

2.1.1. Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan kewenangan pemerintah menjalankan tugas dan fungsinya dalam hubungannya dengan masyarakat dan dunia usaha. Pada dasarnya kebijakan pemerintah dalam menata kehidupan masyarakat di berbagai aspek merupakan kebijakan yang berorientasi pada kepentingan publik (masyarakat). Pengertian kebijakan (*policy*) adalah prinsip atau cara bertindak yang dipilih untuk mengarahkan pengambilan keputusan. Dalam setiap penyusunan kebijakan publik diawali oleh perumusan masalah yang telah diidentifikasi kemudian pelaksanaan kebijakan tersebut ditujukan untuk mengatasi masalah yang terjadi dalam masyarakat.

James Anderson (dalam Agustino, 2012:7) kebijakan publik adalah serangkaian kegiatan yang mempunyai maksud/tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang aktor atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan suatu permasalahan atau suatu hal yang diperhatikan.

Menurut Nurcholis (dalam Tahir, 2014:24) kebijakan sebagai keputusan suatu organisasi yang dimaksud untuk mencapai tujuan tertentu, berisikan ketentuan-ketentuan yang dapat dijadikan pedoman perilaku dalam hal pengambilan keputusan.

Menurut Harroldaswel dan Abraham (dalam Subarso 2013; 3) mengatakan bahwa kebijakan publik hendaknya berisi tujuan, nilai-nilai dan praktik-praktik sosial yang ada dalam masyarakat. Ketika kebijakan publik berisi nilai-nilai yang bertentangan dengan nilai hidup masyarakat, maka kebijakan publik tersebut akan mendapatkan resistensi ketika diimplementasikan. Sebaiknya suatu kebijakan publik harus mampu mengakomodasi nilai-nilai dan praktik-praktik yang hidup dan berkembang di masyarakat.

Pada dasarnya terdapat banyak batasan atau definisi mengenai apa yang dimaksud dengan kebijakan publik (*public policy*) khususnya dalam literatur ilmu politik. Masing-masing definisi tersebut memberi penekanan yang berbeda-beda. Hal ini disebabkan karena kebanyakan definisi dipengaruhi oleh masalah tertentu yang ingin ditelaah oleh seorang analisis kebijakan. Sementara disisi lain, pendekatan dan model yang digunakan para ahli akhirnya juga akan menentukan bagaimana kebijakan publik tersebut hendak didefinisikan. Misalnya, apakah kebijakan dilihat sebagai rangkaian keputusan yang dibuat oleh pemerintah atau sebagai tindakan-tindakan yang dampaknya dapat diramalkan.

Kebijakan publik dibuat oleh pemerintah yang berupa tindakan-tindakan pemerintah. Kebijakan publik baik untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu itu mempunyai tujuan tertentu. Kebijakan publik ditujukan untuk kepentingan masyarakat.

2.2. Teori

2.2.1. Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan publik merupakan salah satu tindakan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan sebelumnya terhadap pengambilan keputusan. Implementasi kebijakan publik adalah tahapan penting dalam realisasi kebijakan sistem secara komprehensif. Dan dalam bagian ini akan disajikan beberapa pendapat mengenai implementasi kebijakan publik.

Menurut Grindle (dalam Winarno, 2014:149) memberikan pandangannya tentang implementasi dengan mengatakan bahwa secara umum, tugas implementasi adalah membentuk suatu kaitan yang memudahkan tujuan-tujuan kebijakan bisa direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah. Oleh karena itu, juga implementasi mencakup terbentuknya “*a policy delivery system*”, dimana sarana-sarana tertentu dirancang dan di jelaskan dengan harapan sampai pada tujuan-tujuan yang diinginkan.

Menurut Jones (Waluyo, 2007:50), “dalam membahas implementasi kebijakan terdapat 2 (dua) sistem yang terlibat, yaitu: (1) Beberapa orang di luar birokrat-birokrat yang mungkin terlibat dalam aktivitas-aktivitas implementasi seperti legistimasi, hakim, dan lain-lain, (2) Birokrat-birokrat itu sendiri yang terlibat dalam aktivitas fungsional, didamping implementasi”.

Sedangkan menurut Waluyo (2007:50-57), implementasi kebijakan merupakan terjemahan kebijakan sistem yang pada umumnya masih berupa pertanyaan-pertanyaan umum yang berisikan tujuan, sasaran ke dalam program-

program yang lebih operasional (program aksi) yang kesemuanya dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran yang telah dinyatakan dalam kebijakan tersebut.

Implementasi kebijakan publik merupakan salah satu aktivitas dalam proses kebijakan publik yang menentukan apakah sebuah kebijakan itu bersentuhan dengan kepentingan publik serta dapat diterima oleh publik. Dalam hal ini, dapat ditekankan bahwa bisa saja dalam tahapan perencanaan dan formulasi kebijakan dilakukan dengan sebaik-baiknya, tetapi jika pada tahapan implementasinya tidak diperhatikan optimalisasinya, maka tentu tidak jelas apa yang diharapkan dari sebuah produk kebijakan itu.

2.2.2. Model Implementasi Kebijakan Publik

Dalam Tahir (2011;122-123) menjelaskan model implementasi kebijakan yang diterangkan oleh Charles O Jones terdapat tiga aktivitas yang mempengaruhi implementasi kebijakan.

Jones (1996:166) mengatakan bahwa: Implementasi kebijakan adalah suatu kegiatan yang dimaksudkan untuk mengoperasikan sebuah program dengan memperhatikan tiga aktivitas utama kegiatan. Menurut Jones ketiga aktivitas tersebut dapat mempengaruhi implementasi kebijakan. Tiga aktivitas dimaksud adalah:

1. Organisasi, pembentukan atau penataan kembali sumber daya, unit-unit serta metode untuk menunjang agar program berjalan,
2. Interpretasi, menafsirkan agar program menjadi rencana dan pengarahan yang tepat dan dapat diterima serta dilaksanakan, dan
3. Aplikasi (penerapan), berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan rutin yang meliputi penyediaan barang dan jasa.

Kemudian dalam Tahir (2014;71-72) model implementasi yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn terdapat enam variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan.

Van Meter dan Van Horn (dalam Subarsono, 2005:99) mengemukakan ada enam variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, yakni: 1) Standar dan sasaran kebijakan, 2) Sumber daya, 3) Komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas, 4) Karakteristik agen pelaksana, 5) Lingkungan ekonomi, sosial, dan politik, 6) Sikap Para pelaksana.

Van Meter dan van Horn dalam teorinya beranjak dari suatu argument bahwa perbedaan-perbedaan dalam proses implementasi akan dipengaruhi oleh sifat kebijakan yang akan dilaksanakan. Selanjutnya mereka menawarkan suatu pendekatan yang mencoba untuk menghubungkan antara isu kebijakan dengan implementasi dan suatu model konseptual yang mempertalikan kebijakan dengan prestasi kerja (*performance*). Kedua ahli ini menegaskan pula pendirinya bahwa perubahan, *control* dan kepatuhan bertindak merupakan konsep-konsep penting dalam prosedur-prosedur implementasi.

Dengan memanfaatkan konsep-konsep tersebut, maka permasalahan yang perlu dikaji dalam hubungan ini ialah hambatan-hambatan apakah yang terjadi dalam mengenalkan perubahan dalam organisasi. Seberapa jauh tingkat efektivitas mekanisme-mekanisme *control* setiap jenjang struktur (masalah ini menyangkut kekuasaan dari pihak yang paling rendah tingkatannya dalam organisasi yang bersangkutan). Seberapa pentingkah rasa keterikatan masing-masing orang dalam organisasi. (Hal ini menyangkut masalah kepatuhan).

Atas dasar pandangan seperti ini Van Meter dan Van Hom kemudian berusaha untuk membuat tipologi kebijakan menurut: 1) Jumlah masing-masing perubahan yang akan dihasilkan dan, 2) Jangkauan atau lingkup kesepakatan terhadap tujuan diantara pihak-pihak yang terlibat dalam proses implementasi.

Alasan dikemukakannya hal ini ialah bahwa proses implementasi itu akan dipengaruhi dimensi-dimensi kebijakan semacam itu, dalam artian bahwa implemementasi kebanyakan akan berhasil apabila perubahan yang dikehendaki *relative* sedikit, sementara kesepakatan terhadap tujuan terutama dari mereka yang mengoperasikan program di lapangan *relative* tinggi.

Dalam Alamsyah, (2016:88) menjelaskan terkait model implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Edward bahwa terdapat empat variabel yang sangat berpengaruh dalam keberhasilan implementasi kebijakan publik.

George Edward III (1980:1) menegaskan bahwa masalah utama administrasi publik adalah *lack of attention to implementation*. Dikatakannya, *without effective implementation the decision of policymakers will not be carried out successfully*. Edward menyarankan untuk memperhatikan empat isu pokok agar implementasi kebijakan menjadi efektif, yaitu *communication, resource, disposition or attitudes*, dan *beureucratic structures*.

Komunikasi berkenaan dengan bagaimana kebijakan dikomunikasikan pada organisasi dan/atau publik, ketersediaan sumber daya untuk melaksanakan kebijakan, sikap dan tanggap dari pihak yang terlibat, dan bagaimana struktur organisasi pelaksana kebijakan.

Resources berkenaan dengan ketersediaan sumber daya pendukung, khususnya sumber daya manusia. Hal ini berkenaan dengan kecakapan pelaksana kebijakan publik untuk *carry out* kebijakan secara efektif.

Disposition berkenaan dengan kesediaan dari para implementor untuk *carry out* kebijakan publik tersebut, kecakapan saja tidak mencukupi, tanpa kesediaan dan komitmen untuk melaksanakan kebijakan.

Struktur birokrasi berkenaan dengan kesesuaian organisasi birokrasi yang menjadi penyelenggara implementasi kebijakan publik. Tantangan adalah bagaimana agar tidak terjadi *beureucratic fragmentation* karena struktur ini menjadikan proses implementasi menjadi jauh dari efektif. Di Indonesia sering terjadi inefektivitas implementasi kebijakan karena kurangnya koordinasi dan kerja sama di antara lembaga-lembaga negara dan/ atau pemerintahan.

2.2.3. Faktor Keberhasilan Implementasi Kebijakan Publik

Menurut George C. Edward III (dalam Agustino, 2020:154-158) bahwa terdapat empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu: (i) komunikasi; (ii) sumber daya; (iii) disposisi; (iv) struktur birokrasi.

Variabel pertama yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan menurut Edward III, adalah komunikasi. Komunikasi, menurutnya sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif yang terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Pengetahuan atas apa yang akan mereka kerjakan dapat berjalan bila komunikasi berjalan dengan baik sehingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan implementasi harus ditransmisikan (atau dikomunikasikan) kepada bagian personalia yang tepat. Selain itu, kebijakan yang dikomunikasikan pun harus tepat, akurat, dan

konsisten. Komunikasi (atau pentransmisi informasi) diperlukan agar para pembuat keputusan dan para implementor akan semakin konsisten dalam melaksanakan setiap kebijakan yang akan diterapkan dalam masyarakat.

Terdapat tiga indikator yang dapat dipakai (atau digunakan) dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi tersebut di atas, yaitu:

- a. Transmisi; penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Seringkali yang terjadi dalam penyaluran komunikasi adalah adanya salah pengertian (miskomunikasi), hal ini disebabkan karena komunikasi telah melalui beberapa tingkatan birokrasi sehingga apa yang diharapkan terdistorsi di tengah jalan.
- b. Kejelasan; komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan (*street-level-bureaucrats*) haruslah jelas dan tidak membingungkan (tidak ambigu). Ketidakjelasan pesan kebijakan tidak selalu menghalangi implementasi, pada tatanan tertentu, namun para pelaksana membutuhkan kejelasan informasi dalam melaksanakan kebijakan agar tujuan yang hendak dicapai sesuai dengan konten kebijakan.
- c. Konsistensi; perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi haruslah konsisten (untuk diterapkan dan dijalankan). Ini karena jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksanaan di lapangan.

Varibel kedua yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan adalah sumber daya. Sumber daya merupakan hal penting lainnya, menurut George C. Edward III, dalam mengimplementasikan kebijakan. Indikator sumber-sumber daya terdiri dari beberapa elemen, yaitu:

- a. Staf; sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf atau sumber daya manusia (SDM). Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh karena staf yang tidak mencukupi, memadai. Ataupun tidak kompeten di bidangnya. Penambahan jumlah staf atau implementor saja tidak mencukupi, tetapi diperlukan pula kecukupan staf dengan keahlian serta kemampuan yang diperlukan pula (kompeten dan kapabilitas) dalam mengimplementasikan kebijakan atau melaksanakan tugas yang diinginkan oleh kebijakan itu sendiri.
- b. Informasi; dalam implementasi kebijakan, informasi mempunyai dua bentuk yaitu: (i) informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. Implementor harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan disaat diberi perintah untuk melakukan Tindakan. Dan (ii) informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan. Implementor harus mengetahui

apakah orang lain yang terlibat di dalam pelaksanaan kebijakan tersebut patuh terhadap hukum.

- c. Wewenang; pada umumnya kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik. Ketika wewenang itu nihil, maka kekuatan para implementor di mata publik tidak terlegitimasi, sehingga dapat mengagalkan proses implementasi kebijakan.

Tetapi, dalam konteks yang lain, Ketika wewenang formal tersebut ada, maka sering terjadi kesalahan dalam melihat afektivitas kewenang-an. Di satu pihak, efektivitas kewenangan diperlukan dalam pelaksanaan implementasi kebijakan; tetapi di sisi lain, efektivitas akan menyusut manakala wewenangan diselewengkan oleh para pelaksana demi kepentingan-kepenting-annya sendiri atau demi kepentingan kelompoknya.

- d. Fasilitas; fasilitas fisik juga merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Implementor mungkin memiliki staf yang mencukupi, mengerti apa yang harus dilakukannya, dan memiliki wewenang untuk melaksanakan tugasnya, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil.

Variabel ketiga yang mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi kebijakan publik, bagi George C. Edward III, adalah disposisi. Disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan adalah faktor penting ketiga dalam pendekatan mengenai pelaksanaan suatu kebijakan publik. Jika pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, sehingga dalam praktiknya tidak terjadinya bias. Hal-hal penting yang perlu dicermati pada variabel disposisi, menurut Edward III, adalah:

- a. Efek Disposisi; disposisi atau sikap para pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personil yang ada tidak melaksanakan kebijakan-kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat tinggi. Oleh karena itu, pemilihan dan pengangkatan personil pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan; lebih khusus bagi pada kepentingan warga.
- b. Melakukan Pengaturan Birokrasi (*staffing the bureaucracy*); dalam konteks ini Edward III mensyaratkan bahwa implementasi kebijakan harus dilihat juga dalam hal pengaturan birokrasi. Ini merujuk pada penunjukan dan pengkatan staf dalam birokrasi yang sesuai dengan kemampuan, kapabilitas, dan kompetensinya. Selain itu, pengaturan birokrasi juga

bermuara pada ‘pembentukan’ sistem pelayanan publik yang optimal, penilaian personil dalam bekerja, hingga metode *bypassing* personil.

- c. Insentif; Edward III menyatakan bahwa salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah kecenderungan para pelaksana adalah orang bertindak menurut kepentingan mereka sendiri, maka memanipulasi insentif. Pada umumnya orang bertindak menurut kepentingan mereka sendiri, maka memanipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi Tindakan para pelaksana kebijakan. Dengan cara menambahkan keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana kebijakan melaksanakan perintah dengan baik. Hal ini dilakukan sebagai upaya memenuhi kepentingan pribadi (*self interest*) atau organisasi.

Variabel keempat menurut George C. Edward III, yang mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi kebijakan publik adalah struktur birokrasi. Walaupun sumber-sumber daya untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia, atau para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang seharusnya dilakukan, dan mempunyai kegiatan untuk melaksanakan suatu kebijakan, kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat terlaksana atau terealisasikan karena terdapat kelemahan dalam struktur birokrasi. Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama banyak orang, Ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka hal ini akan menyebabkan sumber-sumber daya menjadi tidak efektif dan tidak termotivasi sehingga menghambat jalannya kebijakan. Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik.

Dua karakteristik, menurut Edward III, yang dapat mendongkrak kinerja struktur birokrasi atau organisasi ka arah yang lebih baik adalah:

- a. Membuat *Standar Operating Prosedures* (SOPs) yang telah fleksibel; SOPs adalah suatu prosedur atau aktivitas terencana rutin yang memungkinkan para pegawai (atau pelaksana kebijakan seperti aparatur, administrator, atau birokrat) untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pada setiap harinya (*days-to-days politics*) sesuai dengan standar yang telah ditetapkan (atau standar minimum yang dibutuhkan warga).
- b. Melaksanakan fragmentasi, tujuannya untuk menyebarkan tanggung-jawab, berbagai aktivitas, kegiatan, atau program pada beberapa unit kerja yang sesuai dengan bidangnya masing-masing. Dengan terfragmentasinya struktur birokrasi, maka implementasi akan lebih efektif karena dilaksanakan oleh organisasi yang kompeten dan kapabel.

Dalam pemberian pelayanan vaksinasi oleh UPTD Puskesmas Dara Juanti tentu memerlukan komunikasi yang terarah serta jelas maka diperlukan sistem informasi yang terpusat dan memadai serta mudah diakses masyarakat umum. Sistem informasi yang digunakan pihak puskesmas dalam pemberian informasi pelaksanaan vaksin yaitu melalui media sosial berupa *Instagram*.

Pada aplikasi ini pihak puskesmas akan memposting di *feed instagram* terkait informasikan pelaksanaan vaksinasi pada hari tertentu dengan jumlah kuota vaksin yang telah di tentukan. Sementara itu juga terdapat informasi terkait jenis vaksin serta syarat /ketentuan yang harus dibawa ketika mengikuti vaksinasi. Kejelasan informasi terkait jadwal vaksinasi di Puskesmas memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengikuti vaksinasi. Hal ini menampilkan komunikasi yang terarah dan tepat sasaran serta kejelasan informasi yang diterima masyarakat.

Dalam pengimplementasinya memerlukan sumber daya baik dari staf hingga fasilitas. Keterlibatan implementor sebagai pelaksana kebijakan akan mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Staf tenaga kesehatan sebagai pelaksanaan kebijakan tentu harus mampuni baik dalam penerimaan informasi serta menjalankan tugas. Komando pelaksana kebijakan berada pada pemangku jabatan tertinggi di instansi. Maka dari itu kewenangan kepala pimpinan sangat mempengaruhi keberhasilan kebijakan. Dalam mendukung terlaksananya kebijakan vaksinasi tentu memerlukan fasilitas pendukung yang memadai baik dari ketersediaan vaksin hingga fasilitas tunggu bagi masyarakat.

Pada tesknis dilapangan para staf/implementor telah berupaya memberikan pelayanan terbaiknya kepada masyarakat. Pengaturan birokrasi pelaksanaan kebijakan sudah disesuaikan dengan kompetensi dari masing-masing tenaga kesehatan. Dalam hal ini tentu adanya pemilihan staf memerlukan tahapan seleksi yang disesuaikan dengan kebutuhan dilapangan.

Staf puskesmas juga telah berusaha menerapkan SOP (*Standar Operating Procedur*) yang telah dikeluarkan Kementerian Kesehatan. Akan tetapi dalam pelaksanaannya terdapat hal yang tidak dapat dihindari yaitu kerumunan massa yang terjadi akibat perebutan formulir pengisian kuota vaksin. Namun dalam hal ini peneliti menilai bahwa pemberian vaksinasi kepada masyarakat sudah baik dengan mengutamakan atau memprioritas pelayanan kepada ibu hamil dan lanjut usia terlebih dahulu. Selama proses pelaksanaan vaksin telah mengikuti kaidah pemberian vaksin sesuai SOP sehingga terdapat tugas dan tanggung jawab dari masing-masing staf.

Berdasarkan latar belakang dan teori pendukung yang telah dipaparkan, maka penulis menilai bahwa teori Edward III sesuai dan mampu menjawab pertanyaan terkait Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Implementasi Kebijakan Vaksinasi Covid-19 Di Puskesmas Dara Juanti.

2.3. Hasil Penelitian Yang Relevan

Penelitian ini mengangkat sistem tentang kebijakan vaksinasi covid-19. Berdasarkan eksplorasi yang peneliti lakukan dalam kajian kepustakaan,

ditemukan dua tulisan yang cukup relevan dengan sistem penelitian yang peneliti kaji.

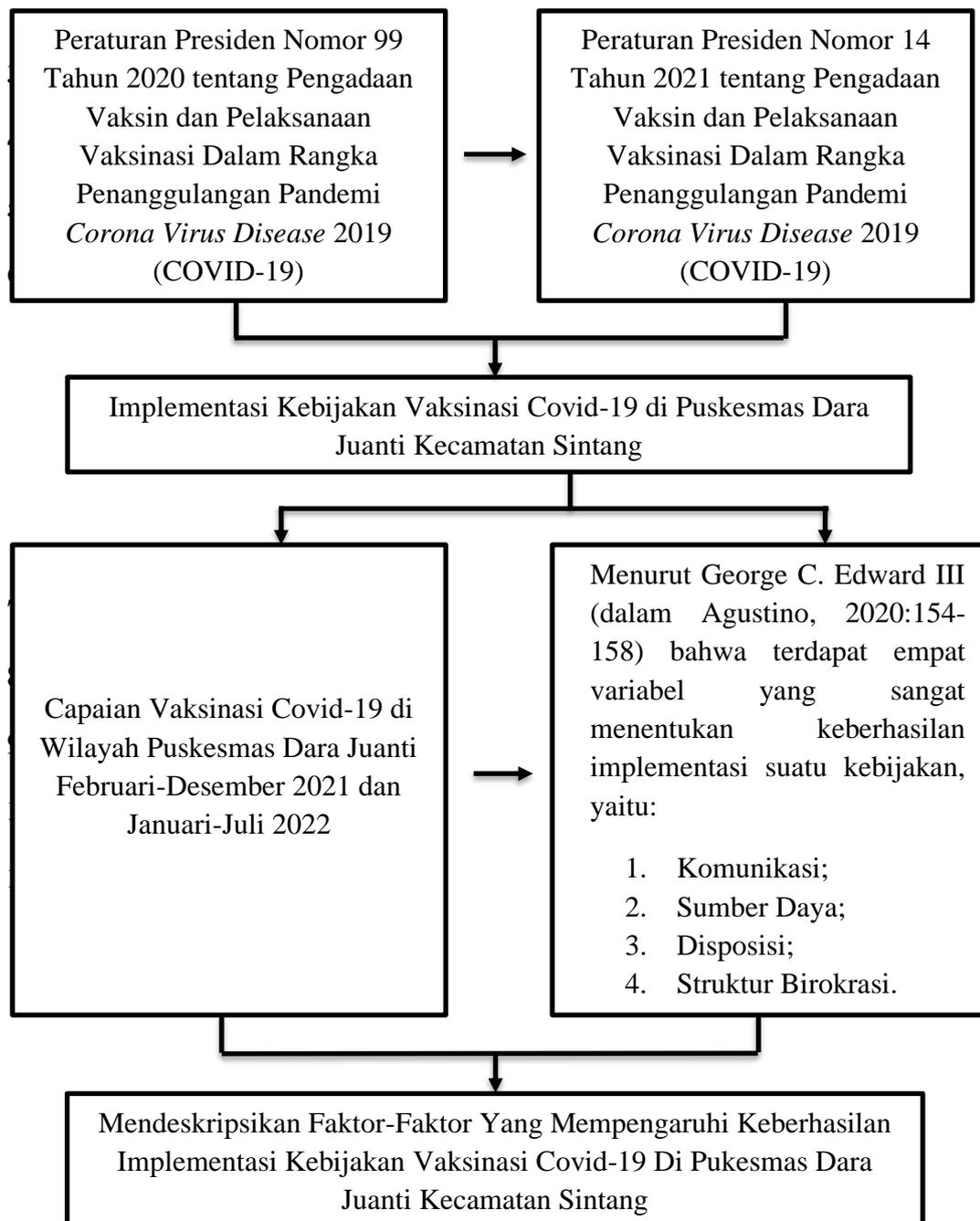
Yang pertama adalah penelitian yang dilakukan oleh Nurlailah (2021) dari Administrator Kesehatan Ahli Madya dengan judul penelitian “Implementasi Kebijakan Vaksinasi Covid-19 di Kab. Ogan Komering Ulu”. Pada Penelitian ini berdasarkan teori George C Edwards III terdapat kesimpulan bahwa komunikasi yang terjalin sudah baik, sumberdaya sebagai pelaksana kebijakan yang masih kurang tetapi cukup memadai dan memiliki kinerja baik, disposisi memiliki dedikasi yang tinggi dan standar keterampilan tetapi pemberian insentif yang masih kurang pada alokasinya, serta struktur birokrasi sudah memiliki SOP yang mencakup mekanisme, sistem dan prosedur pelaksana kebijakan.

Yang kedua pada penelitian yang dilakukan oleh Maharani Ulya Fadhilah dkk (2021) dari Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jawa Timur dengan judul penelitian “Evaluasi Pelayanan Vaksin Covid–19 (Studi Kasus Puskesmas Mojo Kota Surabaya)”. Pada penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Kualitas pelayanan Vaksin Covid-19 di Puskesmas Mojo Kota Surabaya memuaskan. Namun, memiliki kendala pendataan jadwal dan tahapan *online* yang rumit, karena tidak semua tersedia fasilitasnya dan data kependudukan belum diperbarui apabila ada penduduk yang pindah, akibatnya terjadi kerumunan antrian yang panjang untuk memperbarui data penerima vaksin.

Dari penelitian diatas sama-sama membahas tentang vaksinasi yang telah dilaksanakan. Sedangkan perbedaannya terletak pada tahap kebijakan, pada penelitian pertama mengambil tentang implementasi sedangkan penelitian kedua mangambil tentang evaluasi. Waktu dan tempat serta peneliti yang berbeda saat penelitian berlangsung. Teori yang digunakan juga berbeda dengan hasil akhir dari kedua penelitian diatas juga berbeda satu sama lain.

2.4. Alur Pikir Penelitian

Gambar 2.1
Kerangka Pikir Penelitian



Sumber : Dikelola oleh Penulis

2.5. Pertanyaan Penelitian

1. Apakah komunikasi dalam Implementasi Kebijakan Vaksinasi Covid-19 di Puskesmas Dara Juanti Kecamatan Sintang dapat berjalan dengan baik?
2. Apakah sumber daya dalam Implementasi Kebijakan Vaksinasi Covid-19 di Puskesmas Dara Juanti Kecamatan Sintang memadai dalam pelaksanaannya?
3. Apakah disposisi dalam Implementasi Kebijakan Vaksinasi Covid-19 di Puskesmas Dara Juanti Kecamatan Sintang dapat berjalan dengan baik?
4. Apakah struktur birokrasi dalam Implementasi Kebijakan Vaksinasi Covid-19 di Puskesmas Dara Juanti Kecamatan Sintang sesuai dengan standar operating prosedur (SOP)?